

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra-KL merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 Diktum KETIGA menyatakan bahwa unit Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis/UPT di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun rencana strategis (Renstra). Sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal menyusun Renstra Tahun 2010-2014 dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014.

Fungsi Renstra adalah, *Pertama*, merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kemampuan organisasi, mengingat sumber daya yang dimiliki organisasi terbatas. *Kedua*, memberikan arah dan tujuan organisasi. *Ketiga*, sebagai akuntabilitas dan bukti transparansi kepada publik dari lembaga pemerintah dan kementerian dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan memberikan pelayanan kepada publik, dan *Keempat*, evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan rencana strategis, yang akan digunakan untuk merumuskan kembali tujuan dan sasaran organisasi jika diperlukan.

Profil Organisasi

Latar belakang pembentukan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) adalah ide pemisahan fungsi perumusan kebijakan dengan fungsi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga membutuhkan unit yang dapat memberi *second opinion* kepada Menteri Keuangan selaku pengambil keputusan dalam penetapan suatu kebijakan.

Pada awal pembentukannya BKF banyak menghadapi kendala, karena tugas dan fungsinya sangat bersinggungan dengan unit-unit teknis (direktorat jenderal) di lingkungan Departemen Keuangan pada waktu itu, yang telah melaksanakan tugas tersebut dalam kurun waktu cukup lama. Apalagi tugas perumusan kebijakan di unit-

unit teknis diperkuat dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pembentukan direktorat jenderal dan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, BKF lahir sebagai bentuk kompromi dari proses perumusan kebijakan fiskal. Kompromi tersebut diwujudkan dengan mekanisme *check and balance* dimana unit eselon I terkait dengan kebijakan fiskal tetap dapat merumuskan kebijakan fiskal dan BKF memberikan analisis atas rumusan tersebut, dan sebaliknya.

BKF dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan susunan organisasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Badan Kebijakan Fiskal memiliki cakupan bidang tugas meliputi kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, kebijakan ekonomi dan keuangan, pengelolaan risiko fiskal dan kerjasama internasional dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
2. Pusat Kebijakan Belanja Negara
3. Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan
4. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
5. Pusat Kerja Sama Internasional
6. Sekretariat Badan

Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat beberapa tambahan tugas yang belum tertampung dan adanya beberapa tugas yang dalam pelaksanaannya masih tumpang tindih dengan tugas di unit eselon I lain. Pada tahun 2008, dilakukan penataan organisasi kembali yaitu menggabungkan fungsi Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan-BKF dengan Direktorat Penyusunan Asumsi Makro-Direktorat Jenderal Anggaran menjadi Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) dengan penambahan tugas di bidang pemantauan dini, Stabilisasi Sektor Keuangan (SSK) dan *Investor Relation Unit* (IRU). Disamping itu, terdapat penajaman tugas dan fungsi dari unit eselon II lainnya.

Perubahan struktur organisasi BKF tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
4. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
5. Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional
6. Sekretariat Badan

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang handal menjadi kebutuhan utama BKF untuk mendukung tugas utama BKF sebagai unit perumus kebijakan. Namun demikian, sebagai badan baru, BKF memiliki keterbatasan sumber daya manusia dari sisi jumlah dan kompetensi. Untuk memenuhi keterbatasan sumber daya manusia, BKF mendapat dukungan melalui pelimpahan pejabat dan pegawai dari unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk mempercepat peningkatan kapasitas SDM

dilakukan kerjasama dengan lembaga donor melalui program training, magang, beasiswa S2/S3. Profil SDM BKF tahun 2007 sampai dengan 2009 ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Profil SDM Badan Kebijakan Fiskal
Tahun 2007 - 2009

Fitur	2007	2008	2009
Jumlah Pegawai (orang)	337	365	404
Diploma III (orang)	31	41	60
S1/D4 (orang)	117	119	142
S2 (orang)	88	97	99
S3 (orang)	9	8	10
Rasio S2+S3 (%)	29	29	27
Pengiriman Karya Siswa BKF S2 & S3(orang)	11	19	6

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi Pemerintah dewasa ini dirasakan semakin penting. Dengan adanya perkembangan yang signifikan di bidang tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan yang mendasar pada segala aspek. Informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan dalam mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi informasi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumberdaya yang sangat penting dan perlu dikelola secara baik dan benar.

Peran dan tugas BKF dalam merancang kebijakan fiskal dan menganalisa perkembangan ekonomi terkini memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang handal agar dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri keuangan secara cepat, tepat dan akurat. Dalam pelaksanaannya BKF telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala di bidang teknologi informasi secara bertahap. Pada tahun 2009 BKF telah melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana (*hardware*) seperti perbaikan jaringan LAN, pembangunan ruang server/data center, peningkatan akses informasi internet, dan mencukupi personal computer (PC) untuk para pegawai/pejabat dan peneliti. Pada tahun 2009 juga telah dilakukan pengembangan sistem aplikasi (*software*) yang telah dibuat pada tahun 2008, seperti pengembangan Sistem Informasi Ekonomi dan Keuangan untuk Eksekutif (*Economic Executive Dashboard*) menjadi *Mobile Dashboard* yang dapat diakses via internet, dan pengembangan Sistem Monitoring Database APBN.

Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang mulai dicanangkan pada tahun 2007, BKF telah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan manajemen SDM, penyempurnaan proses bisnis dan monitoring pencapaian kinerja. Perkembangan kegiatan reformasi birokrasi di BKF terlihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Perkembangan Kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi

No	Kegiatan	2007	2008	2009
1.	Pembangunan Assessment Center (AC) BKF	AC pejabat eselon II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AC pejabat es.III ▪ Diklat berbasis kompetensi es.II 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AC pejabat es. IV ▪ Diklat berbasis kompetensi es. III
2.	Pembangunan SIMPEG	Pengembangan prototype aplikasi	Sinkronisasi data	Updating data
3.	Peningkatan disiplin pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan SK Kode Etik Pegawai BKF ▪ Pemberlakuan sistem absensi elektronik terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007 	Monitoring implementasi kode etik	Monitoring implementasi kode etik
4.	Penyusunan Uraian Jabatan dan SOP	Penyusunan Uraian Jabatan dan SOP berdasarkan struktur PMK 131/PMK.1/2006	Monitoring dan Evaluasi	Penyempurnaan Uraian Jabatan dan SOP berdasarkan struktur PMK 100/PMK.1/2008
5.	Analisis Beban Kerja (ABK)	Penyampaian data beban kerja 2006	ABK 2007	ABK 2008
6.	Penerapan BSC	Penyusunan peta strategi Depkeu (D-Wide) dan indikator kinerja utama (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring IKU D-Wide ▪ Penyusunan D-One dan D-Two ▪ Otomasi D-Wide 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring IKU D-Wide dan D-One ▪ Otomasi D-One
7.	Penerapan manajemen risiko	--	--	Penyusunan profil risiko

1.2 Kondisi Umum

A. Kondisi Ekonomi Makro 2004 - 2009

Secara umum pengelolaan ekonomi makro selama kurun waktu 2004-2009 sebagai tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 telah berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan. Dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi periode tahun 2005-2008 rata-rata tumbuh mencapai 5,9 persen atau lebih baik dibandingkan dengan periode tahun 2001-2004 yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 4,5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut ditopang oleh stabilitas ekonomi yang semakin kondusif.

Tekanan inflasi periode 2005-2008 cukup tinggi yang rata-ratanya mencapai 10,4 persen. Hal ini akibat kondisi eksternal dari tingginya harga minyak dunia dan harga komoditas utama lainnya, serta krisis keuangan global. Tingginya tingkat inflasi, yang juga dialami oleh sebagian besar negara di dunia, tidak membuat nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat bergejolak tajam. Secara rata-rata nilai tukar rupiah per US\$1 mencapai Rp9.459 atau berfluktuasi sekitar 5,8 persen dibanding rata-rata nilai tukar pada tahun 2004. Stabilitasnya nilai tukar tersebut sejalan dengan SBI 3 bulan yang rata-ratanya masih di bawah 9 persen pada periode yang sama.

Sejak tahun 2004, harga minyak mentah internasional cenderung meningkat. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) meningkat dari US\$37,17 per barel (2004) menjadi US\$97,02 per barel (2008). Di sisi lain, produksi minyak mentah

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena penurunan produksi secara alamiah dari sumur-sumur minyak yang sudah tua juga adanya gangguan produksi akibat bencana alam seperti banjir, serta kegiatan investasi bidang perminyakan yang belum mampu meningkatkan produksi minyak secara signifikan. Pada tahun 2004, produksi minyak mentah mampu mencapai 1,04 juta barel per hari. Namun sejak tahun 2006 hingga saat ini, produksi minyak mentah masih di bawah satu juta barel per hari.

Periode 2004-2008 merupakan masa yang cukup sulit terkait dengan masalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Dua masalah ini pada dasarnya merupakan masalah utama yang banyak dihadapi oleh banyak negara terutama negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Oleh karenanya kedua masalah ini selalu menjadi fokus dalam kebijakan dan program pembangunan setiap tahun yang sekaligus menjadi tantangan program pembangunan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mengurangi pengangguran dengan peningkatan perluasan lapangan kerja yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan selalu mengedepankan prioritas pembangunan dengan pendekatan *pro growth*, *pro poor* dan *pro job*. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut telah membuahkan hasil dengan cukup signifikan. Hal ini terlihat dari menurunnya tingkat pengangguran dari 9,86 persen pada tahun 2004 menjadi 7,87 persen pada tahun 2009. Sementara itu, tingkat kemiskinan yang pada tahun 2004 mencapai 16,66 persen menurun secara drastis menjadi 14,15 persen pada tahun 2009.

Tabel 3
Target dan Pencapaian Ekonomi Makro 2004-2009

No.	Uraian	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
		APBN	PKPP	APBN	PKPP	APBN	PKPP	APBN	PKPP	APBN	PKPP	APBN	Realisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,0	5,10	6,0	5,6	5,5	5,5	6,3	6,3	6,4	6,0	4,3	4,5
2	Inflasi (%)	7,0	6,4	8,6	17,1	6,6	6,6	6,0	6,5	6,5	11,0	6,5	2,7
3	Nilai Tukar (Rp/US\$1)	8.900	8.939	9.800	9.700	9.063	9.020	9.050	9.411	9.110	9.692	10.500	10.400
4	Tingkat Bunga SB13 Bulanan (%)	7,3	8,4	9,0	11,7	9,7	8,0	8,2	7,5	9,3	7,5	7,5	7,5
5	Harga Minyak/IO P (US\$/Barel)	37,1	54,0	51,8	63,8	56,8	60,0	78,0	95,0	97,0	61,0	61,0	61,6
6	Produksi Minyak (Juta Barel/Hari)	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Sumber : Depkeu, EPS, ESDM, diolah

Secara rata-rata, nilai capaian ekonomi makro tahun 2004-2009 adalah sebesar 105 persen sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4. Dengan kata lain ada penyimpangan rata-rata 5 persen antara target ekonomi makro yang tertuang dalam APBN dengan realisasinya. Penyimpangan tertinggi terjadi pada inflasi sebagai dampak naiknya harga minyak dunia. Dari rata-rata sasaran asumsi inflasi pada APBN-P sebesar 6,78 persen, realisasinya mencapai 8,43 persen. Penyimpangan terendah terjadi pada indikator nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, yaitu dalam asumsi APBN-P sebesar Rp9.486 per US\$1 dalam realisasinya sebesar Rp9.581 per US\$1. Dapat dikatakan hanya terjadi penyimpangan sebesar 1 persen.

Tabel 4
Deviasi Pencapaian Ekonomi Makro 2004-2009

No.	Uraian	Rata-rata			Capaian (%)
		APBN	APBN-P	LKPP	
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,85	5,58	5,46	98
2	Inflasi (%)	6,45	6,78	8,43	124
3	Nilai tukar (Rp/US\$1)	9.050	9.486	9.581	101
4	Tingkat bunga SBI rata-rata (%)	8,42	8,45	8,63	102
5	Harga minyak/ ICP (US\$/barell)	52,17	58,97	62,98	107
6	Produksi minyak (juta barell/hari)	1,04	0,99	0,96	97
Rata-rata					105

B. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pada periode 2004–2009, APBN menghadapi tekanan dan tantangan yang semakin berat, baik dari sisi eksternal maupun internal. Sekalipun demikian, berbagai upaya yang selama ini dilakukan dengan tetap berpegang pada kebijakan fiskal yang taat azas dan berhati-hati telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain dengan membaiknya kinerja ekonomi serta meningkatnya kepercayaan dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional. Lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi perkembangan pelaksanaan APBN tersebut diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, ketidakseimbangan ekonomi global dan pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara di dunia telah memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang (kurs) rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini mendorong otoritas moneter untuk juga melakukan kebijakan moneter yang cenderung ketat seperti negara-negara lain. Kondisi tersebut pada gilirannya telah berdampak pada perkembangan berbagai indikator ekonomi makro lainnya, seperti tingkat suku bunga dan inflasi. *Kedua*, adanya kekhawatiran serangan terorisme, meningkatnya kegiatan spekulasi, dan meningkatnya kegiatan perekonomian di beberapa negara, mengakibatkan permintaan akan minyak mentah di pasar internasional meningkat, yang selanjutnya mengakibatkan harga minyak mentah di pasar internasional mengalami gejolak yang luar biasa. Hal ini berpengaruh terhadap semua aspek perekonomian, dan berbagai besaran indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar, tingkat inflasi, dan suku bunga.

Ketiga, adanya bencana alam diberbagai wilayah Indonesia, mengakibatkan beban belanja yang sangat berat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena bencana alam tersebut. *Keempat*, kebijakan perpajakan yang cenderung lebih diarahkan kepada pemberian insentif pajak sebagai bagian dari kebijakan stimulus fiskal, dalam jangka pendek berdampak negatif pada penerimaan negara, meskipun dalam jangka panjang diharapkan akan berdampak positif. Di sisi lain, kebijakan belanja yang diarahkan kepada pemberian stimulus fiskal sampai batas-batas tertentu terbentur pada kemampuan keuangan negara yang masih sangat terbatas.

Dalam upaya memantapkan proses konsolidasi fiskal dimaksud, prioritas kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk: (i) meningkatkan pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

melalui langkah-langkah penyempurnaan administrasi dan kebijakan perpajakan dan PNBPN; (ii) mengendalikan dan mempertajam prioritas alokasi dan pemanfaatan anggaran belanja negara; (iii) memperbaiki pengelolaan utang dan optimalisasi pembiayaan anggaran melalui pencarian sumber-sumber pembiayaan anggaran yang biayanya paling murah, dengan risiko yang paling rendah; (iv) memperbaiki struktur penerimaan dan belanja negara, melalui peningkatan peranan pajak sektor nonmigas dan pengalihan subsidi secara bertahap, serta (v) memperbaiki pengelolaan keuangan negara agar lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan melalui perbaikan manajemen keuangan negara dengan mengacu pada paket undang-undang di bidang keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Dalam rangka memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal, optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara dan hibah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk membiayai belanja negara maupun mengendalikan defisit anggaran. Langkah optimalisasi pendapatan negara dan hibah tersebut dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain terlihat pada perkembangan pendapatan negara dan hibah dalam lima tahun terakhir, yang mengalami peningkatan rata-rata 16,70 persen per tahun, yaitu dari Rp403,1 triliun (17,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2004 menjadi Rp870,9 triliun (16,1 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2009.

Di samping volumenya yang semakin besar, struktur pendapatan negara juga masih cukup sehat dan stabil, seperti terlihat dari komposisi pendapatan negara yang lebih bertumpu pada sumber-sumber penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas. Dalam lima tahun terakhir, peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara dan hibah meningkat, yaitu dari 69,6 persen pada tahun 2004 menjadi 74,9 persen pada tahun 2009. Sebaliknya, kontribusi PNBPN terhadap pendapatan negara dan hibah mengalami penurunan, dari 30,4 persen pada tahun 2004 menjadi 25,0 persen tahun 2009. Pergeseran peranan ini terutama disebabkan oleh adanya perkembangan berbagai faktor eksternal, seperti harga minyak dan kurs (nilai tukar) yang berdampak pada peningkatan sumber-sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya yang berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak bumi dan gas alam (migas).

Sementara itu, realisasi belanja negara juga terus menunjukkan peningkatan, yakni dari Rp427,2 triliun (18,6 persen dari PDB) dalam tahun 2004 menjadi Rp956,4 triliun (18,0 persen dari PDB) dalam tahun 2009, atau meningkat rata-rata 17,9 persen selama lima tahun terakhir (periode tahun 2004-2009). Peningkatan realisasi dan perkiraan belanja negara tersebut selain dipengaruhi oleh perkembangan asumsi ekonomi makro, khususnya harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah (kurs), juga ditentukan oleh kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, seperti perubahan harga BBM di dalam negeri, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban bencana alam, pembayaran bunga utang, dana perimbangan ke daerah serta Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

Pada tahun 2009, peningkatan belanja negara juga disebabkan oleh adanya paket kebijakan stimulus fiskal yang berfungsi sebagai peredam dampak negatif krisis

keuangan global. Stimulus fiskal tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk: (1) pemberian insentif perpajakan; (2) optimalisasi belanja negara untuk sarana dan prasarana pembangunan; (3) alokasi belanja negara untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah; dan (4) dukungan pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur (*Public Private Partnerships-PPPs*).

Melalui kebijakan tersebut, defisit APBN mengalami peningkatan dari 1,0 persen PDB pada tahun 2004 menjadi 1,6 persen PDB pada tahun 2009. Realisasi defisit tahun 2009 jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN-P 2009, sebesar 2,4 persen terhadap PDB sebagai konsekuensi diterapkannya paket stimulus kebijakan fiskal.

Meskipun secara umum selama periode 2004-2009 pemerintah telah berhasil mengatasi ancaman krisis ekonomi, namun masih banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi dimasa yang datang, baik dari eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, walaupun signal pemulihan ekonomi global sudah terlihat, tetapi risiko ketidakpastian masih dapat menghantui para pelaku pasar, seperti peningkatan harga minyak mentah di pasar internasional, peningkatan tingkat pengangguran, kenaikan defisit anggaran negara maju, serta belum seimbanginya pasar keuangan internasional masih menjadi risiko global ke depan. Sedangkan di sisi internal, tantangan yang harus dihadapi antara lain menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah perkembangan situasi politik dan sosial saat ini.

C. Kebijakan Pendapatan Negara

Rencana kegiatan tahun 2005-2009 di bidang kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi: (i) stabilisasi harga pangan pokok, (ii) peningkatan investasi di bidang energi dan energi terbarukan, (iii) peningkatan daya saing produk dalam negeri, (iv) peningkatan volume dan nilai perdagangan dengan cara perluasan akses pasar melalui kerjasama-kerjasama tarif preferensi, (v) pemulihan *injury* industri dalam negeri karena *unfair trade* dan ketidakseimbangan perdagangan, dan (vi) optimalisasi penerimaan cukai.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor riil;
- b) Meningkatkan daya saing;
- c) Menggali potensi pendapatan negara yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- d) Melakukan harmonisasi kebijakan di bidang pendapatan negara.

Beberapa pencapaian program dasar dalam rangka pencapaian tujuan adalah:

1) Stimulus fiskal

Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya peningkatan daya saing dan investasi dalam bidang sektor riil adalah:

- a. PPN-DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah)
Yaitu pemberian insentif perpajakan bagi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberikan oleh pemerintah. Pembentukan kebijakan dilakukan melalui kajian terhadap objek industri tertentu yang memenuhi persyaratan untuk diberikan insentif berupa PPN yang ditanggung oleh pemerintah.

- b. **BM-DTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah)**
Yaitu pemberian insentif perpajakan bagi objek bea masuk yang diberikan oleh pemerintah. Pembentukan kebijakan dilakukan melalui kajian terhadap usulan dari sektor terhadap barang/objek yang diusulkan agar diberikan insentif dalam hal bea masuk. Pemberian insentif dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dimaksudkan agar pemberian insentif tersebut sesuai dan tepat sasaran.
 - c. **Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**
PPnBM atas produk elektronika tertentu dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing produk elektronika dalam negeri terhadap produk ilegal yang akan mendorong tercapainya skala ekonomis yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing ekspor.
- 2) **Tarif Bea Masuk**
- a. **Bea Masuk Umum**
Tarif bea masuk umum merupakan tarif bea masuk yang dikenakan atas impor barang ke dalam daerah pabean. Barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40 persen dari nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dengan tetap memperhatikan kemampuan daya saing industri di dalam negeri. Kebijakan umum di bidang tarif senantiasa ditujukan untuk menurunkan tarif. Penurunan tarif tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan pola harmonisasi tarif bea masuk umum. Harmonisasi tarif bea masuk umum dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri, memberi kepastian berusaha bagi investor, mengantisipasi globalisasi ekonomi, meningkatkan efisiensi administrasi kepabeanan, dan mencegah penyelundupan.
 - b. **Bea Masuk Preferensi**
Tarif bea masuk preferensi dilakukan dalam rangka melaksanakan komitmen sesuai dengan perjanjian internasional. Tarif bea masuk dalam kerangka perdagangan internasional berupa tarif bea masuk multilateral, bilateral dan regional bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan kerjasama perdagangan internasional.
 - c. **Bea Masuk Khusus**
Bea masuk khusus adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan *injury* yang dialami oleh industri karena adanya *unfair trade* yang dilakukan oleh negara lainnya dan karena membanjirnya produk impor di pasar dalam negeri. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk Tindakan Pembalasan. Bea masuk khusus merupakan bea masuk yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perdagangan internasional (WTO) dan dikenakan atas *unfair trade* yang dapat menyebabkan kerugian industri dalam negeri.

3) Deregulasi/regulasi

Deregulasi/regulasi adalah upaya untuk menentukan suatu aturan perpajakan mengenai suatu objek pajak agar sistem perpajakannya baik dan harmonis dimana aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Beberapa kebijakan yang dibentuk diantaranya mengenai struktur tarif cukai, Pembebasan pasal 25 dan 26 UU 17 tahun 2006 (KITE, Hankam, Penanaman Modal), dan analisis keekonomian atas rencana pembentukan /renegosiasi *tax treaty*.

D. Pengelolaan Risiko Fiskal

Pemerintah di berbagai negara sekarang ini menghadapi peningkatan risiko fiskal dan ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Peningkatan risiko fiskal ini utamanya disebabkan adanya perubahan peran pemerintah dari sebagai penyedia pembiayaan menjadi penjamin dalam penyediaan jasa-jasa dan proyek-proyek pembangunan, serta perubahan ekonomi dunia yang dinamis. Dukungan pemerintah dalam penyediaan jasa-jasa dan proyek pembangunan serta perubahan dinamis ekonomi dunia dapat menimbulkan beban fiskal yang tersembunyi yang dapat mengancam kesinambungan fiskal.

Perubahan besaran variabel ekonomi makro dapat menjadi pemicu terjadinya risiko fiskal dikarenakan pemerintah menetapkan suatu asumsi variabel ekonomi makro dalam APBN. Pada kenyataannya kondisi ekonomi makro dunia tidaklah stagnan dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut kadang sangat tajam dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat seperti fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi sepanjang tahun 2008. Hal ini menyebabkan besaran asumsi yang ditetapkan dalam APBN tersebut akan mengalami deviasi dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi selama tahun anggaran berjalan. Deviasi antara asumsi yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi merupakan pemicu risiko fiskal karena dapat menyebabkan penambahan defisit anggaran akibat tidak tercapainya target penerimaan dan atau membengkaknya anggaran belanja.

Terjadinya risiko fiskal yang tidak diantisipasi dengan baik akan membebani anggaran dan mengancam keberlangsungan program-program pemerintah pada tahun berjalan. Kesinambungan fiskal tersebut, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dikelola terutama untuk menjaga agar defisit anggaran tidak melebihi 3 persen dari produk domestik bruto dan utang pemerintah tidak lebih dari 60 persen produk domestik bruto.

Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan menciptakan transparansi posisi fiskal pemerintah, untuk pertama kalinya Pemerintah mengungkapkan potensi risiko fiskal yang dihadapi APBN dalam pernyataan risiko fiskal yang merupakan satu subjudul baru dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2008. Risiko fiskal tersebut didefinisikan sebagai perkembangan-perkembangan umum atau peristiwa-peristiwa tertentu yang dapat mempengaruhi posisi fiskal pemerintah.

E. Pelaksanaan Kerja Sama Internasional

Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan keuangan internasional cukup diakui. Peran ini dicapai salah satunya melalui strategi keterlibatan aktif wakil Kementerian Keuangan dalam berbagai forum kerjasama dan kelompok kerja, baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dan organisasi internasional, seperti ASEAN, ASEAN+3, G-20, OECD, WTO, APEC, IDB, ADB dan lainnya, dengan tujuan utama mendukung posisi Menteri Keuangan di dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Upaya itu juga dilakukan melalui strategi penempatan wakil Kementerian Keuangan pada lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan IDB, yang diharapkan mampu menjembatani komunikasi dan hubungan antara Kementerian Keuangan dengan pejabat lembaga keuangan tersebut, khususnya dalam memasukkan kepentingan ekonomi nasional ke dalam pembahasan kebijakan-kebijakan ke depan.

Isu-isu penting yang dicapai Kementerian Keuangan dalam memberikan kontribusi pemikiran dan partisipasi aktif antara lain : (i) perbaikan sistem keuangan internasional dengan peningkatan peran lebih besar negara berkembang; (ii) peningkatan dukungan pendanaan bagi negara berkembang yang terkena dampak krisis keuangan global; (iii) pengakuan perbedaan negara maju dan negara berkembang di dalam penerapan standar regulasi sistem keuangan global; (iv) peningkatan fungsi *Chiang Mai Initiative* (CMI) melalui pembentukan *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM); dan (v) pembentukan *Credit Guarantee and Investment Mechanism* (CGIM) dalam kerangka *Asian Bond Market Initiative* (ABMI).

Kementerian Keuangan saat ini sedang memperjuangkan beberapa isu penting di dalam forum internasional, antara lain: (i) penciptaan suatu instrumen pendanaan yang lebih fleksibel, mudah diakses dan berbiaya murah atas bantuan lunak untuk negara berkembang yang terkena dampak krisis; (ii) dilanjutkannya reformasi lembaga keuangan internasional, khususnya perimbangan representasi dan hak suara yang lebih baik bagi negara berkembang; (iii) penciptaan suatu mekanisme sistem pembiayaan infrastruktur melalui kerja sama negara-negara berkembang dengan kemungkinan sumber pendanaan baru; (iv) penciptaan mekanisme sistem pembiayaan dalam rangka studi dampak perubahan iklim, khususnya bagi negara berkembang; dan (v) peningkatan kerja sama ekonomi sub regional ASEAN dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.

1.3 Potensi dan Permasalahan

Potensi

Potensi Internal

1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai
2. Tersedianya alat analisis (*tools*) untuk melakukan proyeksi dan simulasi model yang digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal
3. Tersedianya *database* yang mendukung perumusan kebijakan fiskal
4. Mekanisme *check and balance* perumusan kebijakan fiskal yang telah diatur dalam PMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

5. Terjaganya koordinasi dan kerjasama dengan unit eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi lainnya
6. Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup memadai

Potensi Eksternal

1. Potensi ekonomi Indonesia Tahun 2010-2014 mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi pada bulan Desember 2009 yang mencapai 4,5 persen, inflasi sebesar 2,78 persen dan indikator-indikator lain yang menunjukkan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia relatif stabil.
2. Potensi peningkatan pendapatan negara dilakukan melalui pemberian insentif berupa stimulus perpajakan untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri dalam menghadapi persaingan produk luar.
3. Potensi besar yang bisa meningkatkan penerimaan perpajakan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui konversi penggunaan BBM untuk listrik ke penggunaan energi terbarukan khususnya energi panas bumi (*geothermal energy*) melalui dukungan insentif perpajakan. Konversi ini selain meningkatkan pertumbuhan melalui pengurangan impor BBM secara signifikan, juga mengurangi subsidi listrik sehingga bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting, dan peningkatan investasi sektor geotermal yang biasanya memerlukan investasi yang sangat besar.
4. Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk diperbaiki membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara dan sekaligus dapat meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan investasi melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian insentif berupa stimulus perpajakan. Kondisi perdagangan Indonesia di tingkat regional maupun bilateral membawa peluang untuk meningkatkan volume perdagangan melalui FTA, melindungi produk dalam negeri melalui kebijakan tarif khusus, serta menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, melindungi kelestarian SDA, dan menjaga stabilisasi harga kebutuhan dalam negeri melalui kebijakan bea keluar.
5. Peranan penting yang dipegang oleh Kementerian Keuangan mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional misalnya sebagai *co-chair* untuk *working group IV* dalam forum G-20 dan salah satu pemegang arah kebijakan di ASEAN. Potensi ini mengandung peluang penting dalam memasukkan kepentingan-kepentingan nasional dalam setiap agenda dalam forum tersebut. Bahkan Indonesia dapat mengatur irama percepatan pembahasan sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional yang terjadi. Penempatan pejabat dan pegawai pada posisi penting dalam organisasi-organisasi internasional dan lembaga keuangan multilateral seperti ADB dan Bank Dunia juga akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memasukkan kepentingan-kepentingan nasional dalam strategi yang dirumuskan oleh organisasi internasional tersebut.
6. Kuatnya kerjasama yang telah terjalin selama ini, baik dengan negara mitra maupun lembaga keuangan internasional memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh manfaat yang dapat diraih dari kerjasama bilateral dan

multilateral tersebut misalnya dalam upaya menggalang pembiayaan anggaran pemerintah.

7. Keberadaan Indonesia sebagai tuan rumah suatu pertemuan internasional juga merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus membuka kesempatan untuk meningkatkan partisipasi baik dalam hal kualitas maupun kuantitas peserta pertemuan.

Permasalahan

Permasalahan Internal

1. Kompetensi teknis yang dimiliki SDM BKF masih terbatas
2. Beberapa instrumen pemantauan dan kebijakan fiskal masih belum handal
3. Belum terintegrasinya database
4. Implementasi mekanisme *check and balance* perumusan kebijakan fiskal belum efektif dilaksanakan

Permasalahan Eksternal

1. Koordinasi antar eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengambilan kebijakan fiskal masih dirasakan belum optimal. Belum ada forum pengambilan kebijakan apabila terdapat perbedaan pendapat antar unit eselon I, khususnya di bidang perpajakan, sebelum diputuskan Menteri Keuangan.
2. Keterbatasan undang undang perpajakan yang dalam pemberian perpajakan harus melalui Peraturan Pemerintah yang biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk proses perubahan.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpajakan adalah adanya *potential loss* penerimaan perpajakan dalam jangka pendek, sementara *potensial loss* tersebut belum diperhitungkan dalam menargetkan penerimaan perpajakan. Permasalahan juga bisa berupa timbulnya ketidakpuasan dari pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan oleh kebijakan pendapatan negara. Masalah lainnya adalah adanya pembatasan oleh Undang-Undang Perpajakan dalam pemberian insentif/fasilitas perpajakan. Apabila Undang-Undang APBN dijadikan dasar pemberian fasilitas perpajakan, permasalahan yang timbul adalah umur Undang-Undang APBN tersebut yang hanya satu tahun dan sering menimbulkan kontroversi.
4. Meskipun secara umum selama periode 2004-2009 pemerintah telah berhasil mengatasi ancaman krisis ekonomi, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa datang, baik tantangan domestik maupun global. Walaupun signal pemulihan ekonomi global sudah terlihat, tetapi risiko ketidakpastian masih dapat membayangi para pelaku pasar. Berapa lama pemulihan akan terjadi, lonjakan harga minyak yang dapat mempengaruhi APBN dan ekonomi makro secara keseluruhan, peningkatan tingkat pengangguran, kenaikan defisit anggaran negara maju, serta belum seimbangannya pasar keuangan internasional masih menjadi risiko global ke depan. Tantangan domestik adalah berupa gejolak di pasar saham dan keuangan, belum bergeraknya sektor riil secara optimal, dan musibah bencana alam

yang melanda berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas pengelolaan kebijakan fiskal.

5. Ketidakpastian yang tinggi pada lingkungan ekonomi dan keuangan, baik yang bersumber dari domestik maupun global, serta meningkatnya kewajiban kontinjensi sebagai akibat meningkatnya peran Pemerintah dalam penjaminan atas penyediaan jasa-jasa dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur meningkatkan potensi risiko fiskal. Permasalahan yang timbul adalah seberapa besar kemampuan BKF dalam mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi dan mengelola risiko fiskal yang timbul akibat ketidakpastian lingkungan ekonomi dan keuangan serta meningkatnya kewajiban kontinjensi dengan tetap meningkatkan optimalisasi kebijakan fiskal dan menjaga kesinambungan fiskal. Kemampuan tersebut baik dari sisi kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana, khususnya model yang digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan mengukur risiko fiskal.
6. Tantangan pelaksanaan pembangunan ekonomi periode 2010-2014 tetap cukup berat, baik yang berasal dari sisi global maupun domestik. Dari sisi global, paling tidak ada empat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu:
 - a. Ketidakpastian ekonomi global, dengan masih berlanjutnya indikasi penurunan volume perdagangan dunia dan sulitnya mengakses sumber-sumber pendanaan dan investasi;
 - b. Volatilitas harga-harga komoditas utama, yang ditandai dengan mulai meningkatnya harga minyak mentah dunia;
 - c. Integrasi ekonomi global dan regional yang semakin tinggi, sehingga mendorong peningkatan daya saing industri; serta
 - d. Perubahan arsitektur keuangan dunia, dengan semakin pesatnya perkembangan instrumen pembiayaan dan investasi sehingga memerlukan aturan baru dengan tingkat pengawasan yang lebih mendalam.
7. Dari sisi domestik, salah satu tantangan terberat berasal dari masih tingginya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Tantangan lainnya berasal dari kondisi infrastruktur yang masih belum memadai untuk menunjang akselerasi pembangunan. Pelaksanaan program mitigasi dampak krisis global melalui paket stimulus fiskal yang mencapai Rp73,3 triliun di tahun 2009 dirasakan masih lambat dan belum optimal. Oleh karena itu dan sebagai pembelajaran, ke depan harus segera dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui koordinasi yang intensif dan komprehensif antar lembaga negara atau instansi pemerintah.
8. Kebijakan fiskal yang mendukung roda perekonomian nasional, seyogyanya dipersiapkan sedini mungkin dengan perencanaan yang konkrit sehingga pada awal tahun anggaran berbagai program penting dan utama sudah dapat dilaksanakan. Hal ini agar target kebijakan fiskal yang tercermin dalam APBN, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dapat segera tercapai.
9. Selain itu, dalam menjaga stabilitas ekonomi yang semakin baik, langkah koordinasi kebijakan fiskal dan moneter harus terus dioptimalkan guna menghapus disharmoni kebijakan yang terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian pula halnya dengan koordinasi lintas sektor yang harus terus dibenahi agar iklim usaha dan investasi dapat ditingkatkan menjadi semakin kondusif.

10. Langkah antisipatif dan responsif dalam mencermati tantangan-tantangan di atas, akan dapat mengeleminir berbagai permasalahan, gangguan dan hambatan dalam pembangunan ekonomi sedini mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran dan kemiskinan dapat segera diatasi. Dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud.

BAB II

VISI, MISI, DAN STRATEGI BADAN KEBIJAKAN FISKAL

2.1. Visi

Visi Kementerian Keuangan adalah menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara Bertaraf Internasional yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat, serta Instrumen Bagi Proses Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Adil, Makmur, dan Berperadaban Tinggi.

Untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Keuangan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan mempunyai visi:

“Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal yang Antisipatif dan Responsif”

Yang dimaksud dengan **Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal** adalah Badan Kebijakan Fiskal diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang handal dan *aplicable* sehingga diakui dan dipercaya oleh pimpinan Kementerian Keuangan pada khususnya dan masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya. **Antisipatif** artinya handal dalam merencanakan berbagai kegiatan analisis dan kajian yang telah mempertimbangkan kondisi perekonomian jauh ke depan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan fiskal sehingga rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan *aplicable* dan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada. **Responsif**, artinya adanya tantangan ketidakpastian perekonomian global dan kondisi dalam negeri yang belum kondusif, Badan Kebijakan Fiskal harus selalu siap menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi dengan cara melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi yang cepat dan handal untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

2.2. Misi

Untuk mencapai visi menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif, serta sekaligus melaksanakan misi Kementerian Keuangan di bidang pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan, BKF mengemban misi:

- a. Menyajikan informasi dan pemantauan ekonomi dan sektor keuangan yang terkini
- b. Mewujudkan rumusan kebijakan pendapatan negara, APBN, serta ekonomi makro yang dipercaya dengan didukung hasil kajian (*research based policy*)
- c. Mewujudkan pengelolaan risiko fiskal yang pasti dan terukur
- d. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang memberikan manfaat bagi kebijakan fiskal dan perekonomian
- e. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional melalui peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai
- f. Memutakhirkan instrumen kebijakan yang terkini dan aplikatif

Tujuan strategis BKF yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumusan kebijakan fiskal yang *applicable* dan bermanfaat dengan memperhitungkan beban risiko fiskal yang terukur. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, sasaran strategisnya adalah:

1. Pemantauan dini ekonomi dan sektor keuangan yang lebih aktual
2. Peningkatan akurasi proyeksi ekonomi makro
3. Peningkatan kualitas perumusan dan rekomendasi kebijakan APBN
4. Peningkatan kualitas perumusan dan rekomendasi kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBK
5. Minimalisasi dampak risiko fiskal terhadap APBN
6. Peningkatan kualitas pelaporan *contingent liability*
7. Optimalisasi pemanfaatan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional
8. Peningkatan kualitas kajian di bidang ekonomi dan keuangan
9. Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi
10. Peningkatan efektifitas dan efisiensi koordinasi layanan dan dukungan internal

2.3. Strategi Badan Kebijakan Fiskal

A. Strategi Kebijakan Ekonomi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Buku II Bab III subbab 3.3 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara sinergi dengan bidang-bidang yang lain untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi yang harus diciptakan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat adalah (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (2) penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2010-2014 diharapkan meningkat secara bertahap dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,0-7,7 persen pada tahun 2014 atau rata-rata 6,3-6,8 persen per tahun selama lima tahun. Optimisme ini muncul seiring dengan pemulihan ekonomi dunia yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya sekaligus pemulihan pada sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi 2010-2014 secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi periode 2004-2009 yang rata-rata mencapai 5,5 persen.

Secara nominal, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga pada tahun 2014 berada pada kisaran 10.000 triliun rupiah. Nilai ini hampir mendekati dua kali lipat nilai PDB tahun 2009. Meningkatnya PDB ini tidak terlepas dari peranan semua komponen yang mendukung dan memberikan kontribusi pada PDB seperti konsumsi, investasi, ekspor dan impor. Perekonomian dunia yang baik juga memberikan andil bagi peningkatan produksi dalam negeri. Pendapatan masyarakat dunia yang meningkat sebagai imbas dari perbaikan ekonomi dunia akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mendongkrak ekspor Indonesia ke beberapa negara lain di dunia. Peningkatan ekspor ini akan merangsang aktifitas ekonomi domestik dalam meningkatkan dan memperluas produksi sehingga daya tarik terhadap para investor

asing akan semakin meningkat. Iklim investasi yang semakin kondusif, stabilitas ekonomi yang terjaga serta kebijakan ekonomi yang prudent menjadi nilai tambah tersendiri dalam menarik investasi asing maupun domestik. Peningkatan investasi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya berakibat pada peningkatan konsumsi.

Stabilitas Ekonomi

Melalui kebijakan *Inflation Targetting Framework* dan koordinasi kebijakan makro antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, laju inflasi diarahkan menurun secara bertahap hingga mencapai kisaran 3,5-5,5 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2010 inflasi diperkirakan mencapai 5 persen, lebih tinggi dari inflasi tahun 2009 yang mencapai 2,78 persen. Kondisi perekonomian yang semakin membaik dan stabilitas harga yang terjaga diharapkan mampu mengendalikan gejolak kenaikan harga-harga komoditas.

Setelah menembus angka Rp12.000 per US\$1 pada Maret 2009, secara perlahan rupiah terus mengalami apresiasi dan pada Desember 2009 rata-rata nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp9.459 per US\$1. Kondisi tersebut mengindikasikan situasi ekonomi dan keuangan yang semakin stabil. Sejalan dengan hal tersebut dan tingkat inflasi yang terjaga, pergerakan nilai tukar rupiah tahun 2010-2014 diperkirakan relatif stabil dan berada pada kisaran Rp9.250-9.850 per US\$1. Stabilitasnya nilai tukar ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Perbaikan kondisi ekonomi tahun 2009 berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Hampir semua indikator ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, indeks harga saham dan harga-harga komoditas mengarah pada satu titik perbaikan. Sampai dengan akhir tahun 2009, inflasi nasional mencapai 2,78 persen (*yoy*), indeks harga saham mengalami kenaikan hingga mencapai 2.534 dan rupiah mengalami penguatan. Terjaganya indikator-indikator ini memberikan cukup ruang bagi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kembali tingkat suku bunganya. Sampai dengan akhir 2009, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan 7,59 persen. Pada tahun 2010, SBI 3 bulan diperkirakan mencapai 6,5 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan membaiknya indikator ekonomi, secara bertahap suku bunga SBI 3 bulan ini akan menurun hingga mencapai kisaran 5,5 – 6,5 persen pada tahun 2014.

Krisis global yang melanda dunia, berdampak pula pada menurunnya jumlah lapangan kerja dan munculnya masalah pengangguran yang perlu mendapat pemecahan terbaik. Pada tahun 2009, angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya meskipun masih belum sesuai rencana. Dengan semakin meningkatnya investasi di dalam negeri, makin luasnya lapangan kerja yang terbentuk dan kemudahan akses penduduk terhadap sumber-sumber ekonomi, maka tingkat pengangguran diperkirakan terus menurun pada tahun-tahun mendatang. Selama periode 2010-2014 angka pengangguran diharapkan menurun secara bertahap dari 7,41 persen pada 2010 menjadi sekitar 5,0–6,0 persen pada 2014.

Seperti halnya pengangguran, kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan dan tantangan berat yang perlu segera diberikan solusi terbaik. Menurut data historis,

selama periode 2006–2009 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup drastis dari 39,3 juta orang pada 2006 menjadi 32,53 juta orang pada 2009 atau tingkat kemiskinan menurun dari 17,75 persen pada 2006 menjadi 14,15 persen pada 2009. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai 12–13,5 persen dan pada tahun 2014 ditargetkan menurun dan berada pada kisaran 8–10 persen.

Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan ekonomi makro diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Koordinasi dalam penentuan asumsi ekonomi makro

Dalam penyusunan RAPBN perlu dilandasi oleh asumsi ekonomi makro yang akurat, realistis, dan kredibel baik dilihat dari sudut pandang DPR maupun para pelaku pasar. Asumsi ekonomi makro terdiri dari tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak mentah internasional, dan tingkat produksi minyak Indonesia. Untuk mewujudkan asumsi ekonomi makro yang akurat, realistis, dan kredibel, proses penentuan asumsi ekonomi makro dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bank Indonesia, Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Koordinasi yang dilakukan dalam penentuan asumsi makro tersebut dilakukan melalui monitoring perkembangan perekonomian, melakukan kajian-kajian yang mendukung keakurasian proyeksi, serta mengembangkan model-model ekonomi makro sebagai instrumen kebijakan. Melalui koordinasi tersebut diharapkan makin meningkatkan akurasi proyeksi dengan presentase deviasi yang semakin kecil. Presentase rata-rata deviasi atas proyeksi ekonomi makro pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 10 persen dan terus menurun menjadi hanya 5 persen pada tahun 2014. Sedangkan tingkat kepuasan *stakeholder* atas hasil proyeksi ekonomi makro diharapkan mencapai 80 persen pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 85 persen pada tahun 2014.

2) Pengembangan *Economic Executive Dashboard* sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro

Badan Kebijakan Fiskal sebagai institusi yang mempunyai tugas merumuskan rekomendasi kebijakan memerlukan instrumen dasar sebagai piranti dalam proses pengambilan keputusan. Melihat perubahan dan dinamika ekonomi makro yang penuh dengan ketidakpastian serta gejolak ekonomi dunia yang selalu berubah dengan cepat (*turbulence*), ditambah lagi perekonomian dan perdagangan yang makin kompetitif maka pengambilan keputusan secara cepat dan akurat mutlak diperlukan. Oleh karenanya, instrumen pemantauan atau pengawasan dibangun pada periode awal dibentuknya BKF, seperti *Economic Executive Dashboard (EED)*.

EED sebagai alat navigasi yang menyajikan perkembangan berbagai indikator utama ekonomi makro ditampilkan di *WAR Room* (ruang Waspada Antisipatif dan Responsif). *EED* merupakan bentuk laporan ekonomi yang berbasis IT di BKF. Media ini merupakan piranti pemantauan dini yang berisi berbagai indikator

utama (*leading indicators*), baik indikator fiskal maupun moneter serta ekonomi pada umumnya. Selain dapat diakses oleh pejabat internal Kementerian Keuangan melalui jaringan intranet, media ini juga ditopang oleh sistem *SMS gate way* yang mana informasinya dapat disampaikan melalui telepon seluler (*handphone*). Dengan instrumen ini diharapkan pejabat dan pengambil keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dengan cepat mendapatkan informasi maupun data terkini secara lengkap serta *real time*. Sebagian data atau informasi EED ditampilkan secara *real time* dengan sumber data dari Bloomberg, terminal data berlangganan, yang meliputi 3 kategori yaitu pasar uang, pasar modal/obligasi, dan pasar komoditi.

Selain itu, untuk mempertajam analisis dan mendukung proses pengambilan kebijakan, dikembangkan juga berbagai model ekonomi makro bersama-sama dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia seperti: UGM, Unpad, ITB, Unair, dan lain-lain. Model ekonomi makro yang dikembangkan saat ini antara lain MODFI (*Macroeconomic Model of Ministry Finance of Indonesia*), *Early Warning System (EWS)*, *Climate Change, Real Sector, Macro & Micro Stress Test*, dan lain-lain. MODFI adalah model ekonomi makro permintaan dan penawaran agregat dengan basis data Neraca Nasional dan data lainnya serta teori ekonomi yang menjelaskan perilaku dari para pelaku ekonomi dalam ekonomi pasar, dan digunakan untuk melakukan analisa dampak perekonomian terhadap anggaran pemerintah ataupun sebaliknya. Sedangkan *EWS* yang dikembangkan adalah *EWS-C* (terbaru dan bekerja sama dengan UGM) yang lebih menekankan pada fungsinya untuk menyediakan *quick information* bagi pengambil keputusan. Secara spesifik, semua model yang dikembangkan telah ditampilkan dalam bentuk visualisasi pada *dashboard* lebih sederhana dan informatif dimana *policy makers* dapat langsung melihat bagaimana posisi *leading indicators* tersebut.

B. Strategi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sebagai instrumen kebijakan fiskal dan implementasi perencanaan pembangunan setiap tahun, strategi dan pengelolaan APBN memegang peranan penting bagi Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. APBN menjadi salah satu alat perekonomian dalam menyelenggarakan pemerintahan, mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan barang dan jasa, serta menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi.

Sejak tahun 2005, Pemerintah menetapkan suatu strategi kebijakan pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), sekaligus mengurangi pengangguran (*pro job*) dan kemiskinan (*pro poor*). Tiga pilar sasaran pembangunan tersebut secara konsisten menjadi acuan Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kebijakan fiskal yang mampu memacu pertumbuhan sektor riil sekaligus menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi makro. Kesinambungan fiskal dilakukan melalui pemberian stimulus fiskal yang tetap menjaga keseimbangan fiskal, serta pengendalian rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, stabilitas ekonomi makro dapat dipantau dari tingkat inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, suku bunga yang relatif rendah, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Untuk mendukung strategi pembangunan yang telah dicanangkan dan tercapainya perbaikan ekonomi, pemerintah harus mampu menjamin kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Kesinambungan fiskal ini sangat penting karena kegagalan dalam mewujudkannya akan berdampak pada terjadinya berbagai gejolak ekonomi makro atau *contingent liabilities* (kewajiban yang harus ditanggung pemerintah jika sesuatu hal terjadi) yang lebih besar, antara lain meningkatnya *country risk*, yaitu memburuknya kepercayaan investor yang pada gilirannya menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu melahirkan terobosan kebijakan fiskal dan sektor riil dengan terus menjaga stabilitas ekonomi makro sebagai fondasi untuk menopang pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk memberikan stimulus fiskal dengan tetap memperhatikan langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Langkah konsolidasi fiskal ditempuh melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak. Di samping itu, konsolidasi fiskal juga ditempuh melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta pemilihan alternatif pembiayaan yang tepat untuk meminimalkan risiko keuangan (*financial risk*) di masa mendatang.

Dalam tahun 2010-2014, strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan di bidang perpajakan adalah dengan memperbaiki basis perpajakan dengan didukung oleh reformasi dan modernisasi administrasi dan pelayanan pajak dan kepabeanan, memberikan insentif pada kegiatan usaha, daerah tertentu, serta komoditi strategis guna meningkatkan investasi dan ekspor serta mempertahankan dan meningkatkan daya saing usaha di dalam negeri. Di samping itu, pemerintah juga akan terus meningkatkan *law enforcement* perpajakan, meningkatkan efektivitas harmonisasi tarif dalam rangka kerjasama regional maupun internasional, dan penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan *roadmap* industri rokok. Sedangkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak akan dilakukan melalui peningkatan produksi migas dan komoditi SDA lainnya yang didukung dengan insentif fiskal dan kebijakan non fiskal lainnya; dan perbaikan kinerja BUMN melalui restrukturisasi dan *rightsizing* BUMN. Pemerintah juga akan melakukan perbaikan pungutan PNBP melalui penyesuaian tarif pungutan PNBP yang sudah tidak layak, serta peningkatan pengawasan pemungutannya, intensifikasi PNBP dengan melakukan evaluasi, perbaikan peraturan, serta sistem dan prosedur pengelolaan PNBP, dan ekstensifikasi sumber PNBP yang mempunyai potensi ke depan (seperti REDD).

Optimalisasi pendapatan negara, khususnya dari penerimaan perpajakan tersebut membutuhkan suatu kebijakan APBN yang berkesinambungan. Oleh karena itu, guna mewujudkan kebijakan APBN yang *sustainable* dengan beban resiko yang terukur, strategi yang dilakukan adalah dengan menyusun indikator kinerja untuk mengukur tingkat akurasi kebijakan APBN. Strategi tersebut dituangkan dalam bentuk proyeksi terhadap suatu ukuran yang menunjukkan ketepatan perkiraan terhadap suatu keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada sekarang, yang dijabarkan dalam bentuk: (a) perhitungan persentase deviasi target defisit APBN, (b) perhitungan persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan, dan (c) pengajuan rekomendasi alokasi transfer ke daerah yang digunakan sebagai bahan usulan ke DPR. Di samping itu, juga dilakukan pemantauan dini terhadap pelaksanaan

APBN. Dengan demikian, apabila terjadi suatu hal terhadap APBN, maka pemerintah sudah dapat memperkirakan kebijakan antisipatifnya. Sebagai instrumen perumusan kebijakan, terus dikembangkan model APBN yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi dampak perubahan asumsi makro terhadap APBN, baik jangka pendek maupun jangka menengah.

Sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal, volume anggaran belanja negara dalam beberapa tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan belanja negara tersebut, khususnya pada belanja K/L, yang ditujukan untuk mendukung program-program pembangunan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pembangunan sarana dan prasarana, pemantapan stabilitas ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kebijakan dibidang belanja negara dalam tahun 2010-2014 akan diarahkan untuk mendukung pembiayaan prioritas pembangunan jangka menengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk mendukung 11 program prioritas pembangunan jangka menengah, yaitu : (1) reformasi birokrasi dan tata kelola, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) penanggulangan kemiskinan, (5) ketahanan pangan, (6) infrastruktur, (7) iklim investasi dan usaha, (8) energi, (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (10) pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik, (11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Sedangkan strategi di bidang pembiayaan, diarahkan dalam rangka pencapaian 3 sasaran utama yaitu: (a) penurunan stok utang terhadap PDB melalui pengelolaan utang yang berhati-hati, (b) penggunaan utang secara selektif, dan (c) optimalisasi pemanfaatan hibah dan utang. Disamping itu, pemerintah akan terus melakukan pengendalian terhadap defisit APBN menjadi sekitar 1 persen dalam tahun 2014.

C. Strategi Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan PNBPN

Arah kebijakan pendapatan negara tahun 2010–2014 yang menjadi tugas BKF bertujuan meningkatkan kualitas perumusan dan rekomendasi kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBPN yang terfokus pada strategi kebijakan berupa: (a) peningkatan efektivitas kebijakan pendapatan negara, (b) peningkatan mutu rekomendasi dan rumusan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh pimpinan, (c) peningkatan partisipasi dalam perundingan kerjasama tarif preferensi dalam forum bilateral regional dan multilateral dan (d) peningkatan jumlah dan kualitas sosialisasi kebijakan pendapatan negara.

Efektivitas kebijakan pendapatan negara, adalah pengukuran efektivitas kebijakan pendapatan negara melalui survei persepsi *stakeholders* dengan membandingkan antara jumlah kebijakan yang berhasil mencapai *outcome* dengan jumlah kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan digolongkan berhasil mencapai *outcome* apabila tujuan yang tercantum dalam pertimbangan keputusan Menteri Keuangan dapat terealisasi yang diukur melalui survey persepsi *stakeholders*. Peningkatan efektivitas kebijakan pendapatan negara diharapkan meningkat dari 70 persen pada tahun 2010 menjadi 85 persen pada tahun 2014.

Dalam rangka mencapai target tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan pendapatan negara melalui peningkatan kapasitas pejabat perumus, keikutsertaan *stakeholders*, metodologi pengambilan keputusan, dan penggunaan data dan riset yang memenuhi kaidah ilmiah dan hukum. Rekomendasi kebijakan dapat disampaikan sesuai target waktu yang ditentukan dengan kualitas paparan dan kajian yang semakin baik. Selama periode 2010 sampai dengan 2014 diharapkan terjadi peningkatan rekomendasi dan rumusan kebijakan yang diterima pimpinan dari 85 persen menjadi 90 persen.

Peningkatan partisipasi dalam perundingan kerjasama tarif preferensi dalam forum bilateral regional dan multilateral, dalam rangka memenuhi komitmen atas hasil perundingan dan mewujudkannya ke dalam perangkat peraturan pelaksanaan seperti penerbitan PMK mengenai besaran tarif preferensi serta jadwal implementasinya. Selama periode 2010 sampai dengan 2014 diharapkan terjadi peningkatan partisipasi dalam perundingan kerjasama tarif preferensi dalam forum bilateral regional dan multilateral dari 60 persen menjadi 70 persen. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut adalah penyempurnaan rencana penentuan target dan skala prioritas perundingan yang harus dihadiri, mengirim pejabat yang kompeten di bidangnya dan perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Sosialisasi kebijakan pendapatan negara mengikutsertakan pembuat kebijakan, pelaksana dan penerima manfaat atau dampak kebijakan, untuk menjelaskan mengenai latar belakang, alasan tujuan dan manfaat yang diharapkan atas pelaksanaan kebijakan pendapatan negara. Peningkatan kualitas sosialisasi dicapai dengan upaya peningkatan kapasitas narasumber dan penyempurnaan rencana penentuan target peserta. Selama periode 2010-2014 diharapkan jumlah dan kualitas sosialisasi kebijakan pendapatan negara selalu memenuhi target 100 persen.

Kegiatan penyusunan RPP *Cost Recovery* telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melibatkan seluruh instansi terkait. Proses penyusunan RPP tersebut saat ini telah memasuki tahap pembahasan dengan Kementerian ESDM terkait redaksional dan penjelasan. Pembahasan terkait materi dalam pasal-pasal dan materi dalam ketentuan peralihan telah selesai dilaksanakan dan telah tercapai kesepakatan antara DJP dan Kementerian ESDM. Berdasarkan konfirmasi dari DJP, penyusunan RPP ini diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Juni 2010. Badan Kebijakan Fiskal ikut berperan aktif dalam setiap rapat pembahasan yang diselenggarakan selama proses penyusunan RPP tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, bertujuan untuk mengantisipasi semakin turunnya *lifting* minyak nasional dengan memberikan insentif fiskal yang dapat mendorong adanya investasi baru pada kegiatan-kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi Indonesia. Kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang guna kegiatan eksplorasi pada hulu migas dan panas bumi didasarkan pada Undang-Undang APBN yang diterbitkan setiap tahun. Pemberian insentif fiskal ini dimulai pada tahun anggaran 2008, dengan dasar hukum sebagai berikut: (a) UU nomor 45 tahun 2007 untuk tahun anggaran 2008, (b) UU nomor 41 tahun 2008 untuk tahun anggaran 2009, dan (c) UU nomor 47 tahun 2009 untuk tahun anggaran 2010. Implementasi undang-undang mengenai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dilakukan dengan: (1) tahun anggaran 2008 (dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.011/2007), (2) tahun anggaran 2009 (dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.011/2008) dan terakhir pada tahun anggaran 2010 (dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.011/2010) dengan pagu anggaran sebesar Rp2,5 triliun. Pemberian fasilitas ini akan dilakukan evaluasi paling lama satu tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Usulan perubahan PP nomor 34 tahun 1996 agar sesuai dengan UU kepabeanaan dan praktek kepabeanaan internasional. Sebagai salah satu anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994 yang selanjutnya dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1996 tentang Kepabeanaan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006. Salah satu klausul yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanaan adalah mengenai penerapan bea masuk khusus, yang terdiri dari Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Imbalan (BMI), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Bea Masuk Pembalasan yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pasal 23D Undang-Undang Kepabeanaan mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kementerian Keuangan cq. BKF saat ini sedang melakukan pembahasan dengan instansi-instansi teknis terkait guna merumuskan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Dalam hal ini, BKF telah mengusulkan beberapa hal yang terkait dengan kewenangan Menteri Keuangan menetapkan tarif bea masuk, yaitu mengenai (i) jangka waktu penetapan tarif bea masuk khusus setelah diterimanya keputusan Menteri perdagangan, (ii) pengaturan tentang tatacara dan persyaratan dan penetapan tarif bea masuk khusus selama masa peninjauan kembali (*review*) yang ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa peninjauan kembali serta tatacara dan persyaratan dan penetapan/ pencabutan bea masuk khusus pasca masa peninjauan kembali sampai dengan keluarnya bea masuk khusus tetap dan (iii) pengaturan bahwa keberatan atas pengenaan bea masuk khusus yang diajukan untuk diselesaikan oleh *Dispute Settlement Body - WTO*, pada hakekatnya bukan karena penetapan oleh Menteri Keuangan, tetapi atas keputusan pengenaan oleh Menteri Perdagangan sesuai hasil penyelidikan KADI.

Kajian usulan pengenaan pajak ekspor (bea keluar) atas produk bahan mentah dan implikasi fiskal dan ekonomi, sedang dalam proses pengumpulan bahan dan menerima masukan dari pihak-pihak terkait. Dalam proses tersebut telah dilakukan rapat untuk membahas isu-isu terkait pengenaan bea keluar atas produk bahan mentah terutama dampaknya terhadap kinerja fiskal dan ekonomi. Selanjutnya akan dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui efektifitas pengenaan pajak ekspor (bea keluar) dan kemudian dapat dijadikan rekomendasi untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

PMK Harmonisasi Tarif Bea Masuk, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 tanggal 21 Desember 2004 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.011/2004 tanggal 23 Desember 2005 telah dirumuskan Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Indonesia untuk tahun 2005 sampai dengan

2010. Kedua Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur pola perubahan tarif bea masuk Indonesia secara terjadual setiap tahun. Program harmonisasi tarif bea masuk dirumuskan dengan tujuan guna dapat melahirkan kebijakan tarif bea masuk yang optimal dengan memperhatikan fungsi-fungsinya sebagai berikut: (1) sebagai instrumen pengembangan industri yang didasarkan kepada *roadmap* dan tingkat daya saing, (2) sebagai instrumen perdagangan dengan memperhatikan komitmen-komitmen perdagangan di tengah era globalisasi dewasa ini: (3) sebagai instrumen fiskal dimana tarif bea masuk merupakan salah satu pos dari penerimaan negara. Untuk mencapai sasaran kebijakan tarif bea masuk yang optimal, melalui program harmonisasi tarif bea masuk tahun 2005-2010 telah ditetapkan target jangka menengah, yakni pada tahun 2010 tarif bea masuk Indonesia bersifat: (1) relatif harmonis dari hulu, antara, dan hilir, (2) relatif uniform, yakni dengan struktur yang lebih sederhana, dan (3) relatif rendah, guna mengantisipasi globalisasi perdagangan dunia. Program harmonisasi tarif bea masuk ini telah diimplementasikan secara terjadual setiap tahun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dengan penetapannya melalui Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya. Untuk tahun 2010 ini, Kementerian Keuangan cq. Tim Tarif sedang melakukan pembahasan dengan para pembina sektor industri dari kementerian-kementerian teknis terkait guna merumuskan kebijakan tarif bea masuk untuk tahun 2010.

Dalam merumuskan PMK Pemberian Fasilitas Perpajakan terhadap pemanfaatan energi terbarukan (*renewable energy*), BKF turut berperan aktif. Tujuan dari perumusan tersebut adalah: (1) Untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi tidak terbarukan dan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan, (2) Untuk menarik investasi dan daya saing di bidang pemanfaatan sumber energi. Rapat-rapat telah dilakukan dengan wakil-wakil dari Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktur Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (ESDM), serta Kepala Biro Hukum, untuk membahas bentuk-bentuk fasilitas perpajakan tambahan yang dapat diberikan terhadap upaya pemanfaatan energi terbarukan. Adapun fasilitas perpajakan tambahan yang dapat diberikan untuk pemanfaatan energi terbarukan adalah sebagai berikut: (1) PPN Tidak Dipungut untuk impor barang keperluan energi terbarukan dan (2) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor atas barang untuk keperluan pemanfaatan energi terbarukan.

D. Strategi Kebijakan Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan

Secara umum, tujuan utama pengelolaan risiko fiskal adalah mitigasi risiko dalam rangka menjamin kesinambungan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program pemerintah. Penentuan besaran anggaran cadangan risiko fiskal yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut merupakan salah satu alat pengelolaan risiko dalam APBN. Untuk mengetahui besaran anggaran cadangan risiko fiskal, diperlukan suatu perhitungan yang cermat dan komprehensif melalui proses pengidentifikasian risiko, pengukuran dampak, dan pemetaan risikonya.

Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan risiko fiskal adalah sebagai berikut:

1) Penyempurnaan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam Nota Keuangan

Pada saat pertama kalinya pemerintah mengungkapkan potensi risiko fiskal di dalam Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2008, pengungkapan potensi risiko fiskal difokuskan pada proses pengidentifikasian risiko fiskal. Kemudian, dalam Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2009, pemerintah menyajikan pengukuran dan pengungkapan anggaran cadangan risiko fiskal. Pengungkapan ini diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan menciptakan transparansi posisi fiskal pemerintah.

Sedangkan fokus strategi tahun 2010-2014 untuk menyempurnakan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam nota keuangan adalah ketepatan pengukuran cadangan risiko fiskal, pengaturan penganggaran untuk cadangan risiko fiskal dan pengungkapan strategi pengelolaan risiko fiskal. Model yang dikembangkan untuk peningkatan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam nota keuangan adalah Model Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2) Optimalisasi dukungan Pemerintah untuk percepatan proyek infrastruktur melalui APBN dan/atau melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

Salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi adalah dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,5-5,6 persen. Di samping itu infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sehingga percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas, meliputi sektor energi, sektor transportasi, sektor telekomunikasi, dan sektor sanitasi (air bersih dan pengelolaan limbah).

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar. Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur tahun 2010–2014 diproyeksikan berkisar Rp1.400 triliun. Sementara kemampuan anggaran pemerintah sangat terbatas, hanya berkisar 31 persen dari kebutuhan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi *financing gap* bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut adalah dengan mengundang partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), atau lebih dikenal dengan *Public-Private Partnership* (PPP). Keterlibatan sektor swasta diharapkan dapat memenuhi selisih pembiayaan dan dapat menyediakan layanan yang lebih efisien dan lebih baik karena memiliki keahlian yang lebih terfokus dan sistem pemberian insentif yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong keikutsertaan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, salah satu arah kebijakan Pemerintah adalah memberikan Dukungan Pemerintah bagi proyek infrastruktur dalam bentuk menjamin sebagian risiko yang dihadapi investor, yaitu risiko politik, risiko kinerja proyek, dan risiko permintaan. Hal ini diatur dalam PMK No.38 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, maka PMK No. 38 Tahun 2006 akan direvisi dengan target penyelesaian pada bulan Juli 2010.

Disamping itu, untuk meningkatkan *creditworthiness* proyek infrastruktur, Pemerintah juga mendirikan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (*Infrastructure Guarantee Fund*) yang bertugas memberikan penjaminan atas kewajiban pemerintah terhadap proyek KPS. Penjaminan hanya diberikan atas risiko proyek infrastruktur yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Operasionalisasi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini merupakan salah satu fokus strategi Badan Kebijakan Fiskal tahun 2010–2014.

Pemerintah menyadari bahwa pemberian dukungan Pemerintah bagi pembangunan infrastruktur akan menimbulkan kewajiban kontinjensi yang dapat mengancam kesinambungan fiskal. Oleh sebab itu setiap kewajiban kontinjensi Pemerintah yang timbul akibat pemberian dukungan Pemerintah harus dilakukan secara optimal, transparan, dan terukur. Optimalisasi dukungan Pemerintah ini merupakan salah satu fokus strategi yang dilakukan BKF dalam pengelolaan risiko fiskal.

- 3) Pengelolaan risiko fiskal BUMN strategis untuk optimalisasi kontribusi bersih BUMN terhadap APBN dan peningkatan pelayanan umum dengan beban APBN yang terukur.

Di samping berperan besar dalam pendapatan negara yang bersumber dari pajak, deviden dan penerimaan bukan pajak lainnya, terjadi peningkatan peran BUMN dalam pembangunan sebagai agen perubahan dan pelaksana sebagian kewajiban pelayanan umum yang ditugaskan oleh Pemerintah. Kedua peran yang disebut terakhir tersebut memiliki dampak baik bersifat langsung maupun tidak langsung kepada keuangan Negara, melalui subsidi/PSO dan Penyertaan Modal Negara.

Mengingat begitu besarnya peran BUMN terhadap APBN, kesinambungan fiskal juga tergantung dengan kinerja BUMN. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMN baik eksternal maupun internal merupakan faktor risiko bagi APBN. Sebagai gambaran, pada tahun anggaran 2008, ketika harga minyak naik mencapai di atas USD120 per barrel, beban subsidi BBM dan listrik pada APBN yang mekanisme pembayarannya melalui BUMN meningkat tajam. Khusus tentang subsidi listrik, perhitungannya memasukkan unsur biaya korporasi sebagai dasar perhitungan, sehingga secara langsung kinerja BUMN menjadi salah satu sumber risiko bagi APBN.

Strategi pengelolaan risiko fiskal BUMN mengikuti tahapan dalam proses pengelolaan risiko pada umumnya. Tahapan tersebut terdiri dari proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko. Kegiatan yang telah dan akan terus dilakukan adalah mengumpulkan dan mengolah data keuangan BUMN ke dalam model pengukuran risiko fiskal dengan *macrostress test* sebagai *tools*-nya. Model tersebut menggunakan tiga indikator risiko fiskal utama yaitu kontribusi bersih terhadap APBN, hutang bersih dan kebutuhan pendanaan BUMN, untuk mengukur seberapa besar sensitivitas perubahan variabel makro ekonomi, perubahan lingkungan industri, perubahan operasi bisnis dan perubahan regulasi terhadap kinerja BUMN dapat berdampak pada APBN.

Fokus strategi tahun 2010–2014 adalah pengembangan model *macrostress test* risiko fiskal BUMN, antara lain melalui perluasan objek model dengan mengutamakan BUMN strategis, yaitu menjadi 40 BUMN tahun 2014 dan perluasan pengukuran sumber risiko, tidak hanya variabel makro tetapi juga variabel mikro. Dengan

menggunakan model ini diharapkan dapat diberikan rekomendasi pengelolaan risiko fiskal BUMN yang tepat, baik risiko fiskal terkait pengelolaan dan penyehatan BUMN, evaluasi PSO, program privatisasi, dan penyertaan modal negara. Pada akhirnya, pengelolaan risiko fiskal BUMN bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kontribusi bersih BUMN terhadap APBN sehingga meningkatkan *fiscal sustainability* sekaligus meningkatkan keterukuran beban pelayanan umum melalui APBN.

Selain pengembangan model *macrostress test* dan *microstress test*, juga akan dilakukan pengembangan monitoring risiko keuangan BUMN di sektor energi, yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada *lender* baik yang murni pinjaman korporasi maupun pinjaman yang dijamin Pemerintah, serta volatilitas harga komoditi energi terhadap APBN baik dari sisi penerimaan maupun belanja (defisit).

E. Strategi Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Dan Keuangan Internasional

Secara umum terdapat dua sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Keuangan pada masa yang akan datang yaitu melalui partisipasi aktif Kementerian Keuangan dalam berbagai forum kerjasama internasional dengan tujuan utama mendukung posisi Menteri Keuangan dalam forum kerja sama dimaksud dan melalui penempatan wakil Kementerian Keuangan pada berbagai lembaga keuangan internasional.

1) Partisipasi aktif dalam forum kerjasama internasional

Sasaran pertama dapat dicapai melalui peran dan kontribusi aktif Kementerian Keuangan dalam pembahasan dan penyelesaian isu-isu penting kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Peran dan kontribusi aktif tersebut dapat dilakukan antara lain melalui:

- sumbangan pemikiran dan tindakan dalam rangka perbaikan sistem keuangan internasional,
- mendorong peningkatan peran yang lebih besar bagi negara berkembang dalam pembahasan isu-isu keuangan internasional,
- peningkatan dukungan pendanaan bagi negara berkembang khususnya bagi negara yang cukup parah terkena dampak krisis keuangan global,
- mengupayakan perlakuan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang dalam penerapan standar regulasi sistem keuangan global, dan
- optimalisasi fungsi *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) maupun *credit guarantee and investment mechanism* (CGIM) dalam kerangka *Asian Bond Market Initiative* (ABMI).

Selain beberapa isu yang sudah diadopsi tersebut, Kementerian Keuangan saat ini juga tengah memperjuangkan beberapa isu penting dalam berbagai forum internasional, antara lain: (i) mendorong upaya pemberian bantuan lunak bagi negara berkembang yang terkena dampak krisis parah melalui penciptaan instrumen pendanaan yang lebih fleksibel, mudah diakses dan berbiaya murah; (ii) mendorong dilanjutkannya kerangka reformasi makro ekonomi dan lembaga keuangan internasional, khususnya melalui perimbangan representasi dan hak suara yang lebih baik lagi bagi negara berkembang, (iii) mendorong penciptaan suatu mekanisme sistem

pembiayaan infrastruktur yang baik melalui kerja sama antar negara-negara berkembang dengan kemungkinan sumber pendanaan baru, (iv) mendorong penciptaan mekanisme sistem pembiayaan dalam rangka studi dampak perubahan iklim, khususnya bagi negara berkembang, dan (v) mendorong upaya peningkatan kerja sama ekonomi sub regional ASEAN dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.

Untuk mendukung perwujudan upaya-upaya di atas, Kementerian Keuangan selanjutnya perlu menetapkan rencana-rencana aksi dalam bentuk (i) Percepatan Finalisasi Modalitas Liberalisasi Jasa Keuangan ASEAN, (ii) Peningkatan kapasitas *National Surveillance Unit* (NSU), (iii) Percepatan Implementasi *ASEAN+3 Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), (iv) Percepatan implementasi *ASEAN+3 Credit Guarantee and Investment Mechanism*, (v) Pemanfaatan bantuan Hibah Luar negeri melalui *program Degree dan Non – Degree*, (vi) Pengisian *Template G-20 Framework for strong, Sustainable and Balanced growth*, (vii) Peningkatan koordinasi dalam menangani Isu-isu G-20, (viii) Perpanjangan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) dengan China dan Korea, dan (ix) peningkatan posisi Indonesia dalam liberalisasi perdagangan jasa keuangan.

Keberhasilan Kementerian Keuangan dalam meloloskan berbagai pemikiran dan kebijakan di berbagai forum kerjasama ekonomi dan keuangan internasional semata-mata tidak hanya didasarkan atas keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional dimaksud melainkan juga didukung oleh peran dan posisi penting yang dipegang Kementerian Keuangan saat ini dalam forum kerjasama internasional tersebut. Dalam hal ini Kementerian Keuangan berhasil menempatkan salah satu wakilnya sebagai *Co-Chair Working Group IV* dalam forum G-20. Posisi strategis ini memungkinkan Kementerian Keuangan untuk memasukkan kepentingan-kepentingan nasional dalam setiap agenda pembahasan dalam forum tersebut. Bahkan Indonesia dapat mengatur irama percepatan pembahasan sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional yang ada.

Kerjasama yang telah terjalin erat selama ini, baik dengan negara mitra maupun lembaga keuangan internasional, memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh berbagai manfaat yang dapat diraih dari kerjasama bilateral dan multilateral yang dilakukan misalnya dalam upaya menggalang pembiayaan anggaran pemerintah. Selain itu, dalam berbagai kesempatan, keberadaan Indonesia sebagai tuan rumah suatu pertemuan internasional juga merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus membuka peluang investasi dan kerjasama ekonomi lainnya mengingat bahwa peserta yang hadir tidak hanya dari kalangan pemerintah melainkan juga dari kalangan swasta.

2) Penempatan wakil pada lembaga keuangan multilateral

Strategi penempatan wakil Kementerian Keuangan pada lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan IDB, dilakukan dengan tujuan agar mereka mampu menjembatani komunikasi dan hubungan antara Kementerian Keuangan dengan pejabat lembaga keuangan tersebut sehingga dapat mempermudah akses untuk mengakomodir berbagai kepentingan nasional dalam pembahasan-pembahasan program/rencana kerja lembaga keuangan internasional tersebut. Oleh karena itu, penempatan pejabat dan pegawai yang kompeten untuk menduduki posisi-

posisi penting dalam lembaga-lembaga keuangan internasional dilakukan melalui proses seleksi yang memadai.

F. Strategi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Arah kebijakan BKF dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berkomitmen dan berintegritas tinggi melalui perencanaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja. Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi BKF dan melihat tantangan ke depan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang handal dan cepat, menyusun prognosa yang *predictable*, menyajikan analisis risiko fiskal yang *reliable*, serta berupaya meningkatkan peran Indonesia dalam forum internasional, maka BKF dituntut untuk memiliki SDM yang lebih profesional dan berkapasitas tinggi.

Program peningkatan kapasitas SDM yang sudah dimulai sejak berdirinya BKF lebih dipertajam dengan melakukan program percepatan peningkatan kompetensi SDM, khususnya peningkatan jumlah pegawai yang berpendidikan S2 dan S3. SDM BKF diberi kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan pendidikan dengan beasiswa baik yang berasal dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) maupun lembaga donor.

Untuk program percepatan, BKF merencanakan beasiswa program *dual degree* bekerja sama dengan lembaga donor. Program *dual degree* merupakan program beasiswa yang ditempuh di dua universitas, tahun pertama di dalam negeri dalam kelas bahasa Inggris, tahun kedua di universitas luar negeri. Program ini dianggap lebih cocok dan bisa mempercepat peningkatan kapasitas pegawai mengingat masih banyaknya keterbatasan pegawai dari sisi bahasa asing. *Dual degree* adalah program *cost sharing* antara anggaran dari DIPA BKF dan hibah dari lembaga donor.

Target BKF sampai dengan lima tahun ke depan terkait dengan peningkatan jumlah pegawai yang berpendidikan S2 dan S3 adalah 40 persen dibandingkan dengan jumlah total pegawai. Dengan dukungan SDM yang berkapasitas tinggi diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas hasil analisis dan kajian sehingga menghasilkan:

- rumusan kebijakan fiskal yang handal dan cepat,
- prognosa yang *predictable*,
- analisis risiko fiskal yang *reliable*, dan
- peningkatan peran Indonesia dalam forum internasional.

Untuk mendukung tercapainya target tersebut, maka di kuartal empat tahun 2009, selama tahun 2010 dan 2011, BKF akan menyelenggarakan berbagai training khusus bagi para pegawai yang potensial, di luar program-program training reguler.

Arah kebijakan di bidang organisasi adalah mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien melalui mekanisme kerja yang jelas dan evaluasi organisasi. Strategi yang akan dilakukan oleh BKF adalah monitoring implementasi *strandard operation prosedurs* (SOP) dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kerja dan efisiensi. Dengan kegiatan monitoring implementasi, juga diharapkan dapat mengetahui efektifitas SOP dan penyempurnaan yang perlu dilakukan, serta dapat diketahui kebutuhan akan SOP baru seiring dengan perkembangan yang terjadi.

Disamping itu, strategi BKF terkait dengan upaya pencapaian efektifitas organisasi adalah melakukan survei tingkat kepuasan pegawai pada setiap menjelang akhir tahun sampai dengan 2014. Diharapkan hasilnya meningkat dibandingkan dengan yang dilakukan pada tahun 2009. Orientasi kepuasan *stakeholder* menjadi latar belakang perlunya melakukan survey kepuasan pegawai, mengingat pegawai mempunyai peranan besar terhadap kinerja BKF. Kepuasan *stakeholder* sulit dicapai apabila tidak ada perhatian dan monitoring terhadap kepuasan pegawai. Hasil survey juga merupakan umpan balik terhadap kebijakan yang dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan.

Target kepuasan pegawai yang hendak dicapai pada tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah berada pada tingkat 3,5 sampai dengan 3,75 dengan skala 5. Upaya-upaya perbaikan akan terus dilakukan berdasarkan hasil survey dari tahun ke tahun. Mengingat BKF merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, yang mempunyai kebijakan-kebijakan di bidang SDM yang berlaku umum, maka hasil survey yang dilakukan diharapkan juga bisa menjadi bahan evaluasi dan reformasi kebijakan di masa mendatang.

Efektifitas dan efisiensi organisasi juga diharapkan tercapai dengan strategi efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan anggaran yang terintegrasi dan berbasis kinerja, sesuai dengan implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, BKF telah melakukan restrukturisasi program dan kegiatan dengan masing-masing unit eselon II memiliki satu nomenklatur kegiatan yang akan memudahkan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Selain itu, akan tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja dan terjaminnya transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Terkait dengan target pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2010-2014, BKF merencanakan penyerapan anggaran berkisar pada angka 85 persen sampai dengan 90 persen. Upaya pencapaian target dilakukan melalui koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan intensif.

Pemanfaatan teknologi dan informasi (TI) untuk mendukung proses bisnis organisasi dalam merespon kebutuhan *stakeholder* dan untuk mencapai tujuannya telah dianggap sebagai suatu keharusan. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan sasaran strategis di bidang TI diarahkan untuk mencapai pengelolaan TI yang efisien, efektif dan komprehensif untuk mencapai pengelolaan basis data ekonomi, keuangan dan fiskal yang akurat, cepat dan akuntabel yang didukung oleh sarana dan prasarana (*hardware/software*) yang mutakhir, namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*.

Secara umum terdapat tiga target utama di bidang TI yang harus dicapai oleh BKF, yaitu (i) penyediaan perangkat keras/lunak (*hardware/software*) yang mutakhir dan handal, (ii) pengintegrasian *database* dan sistem aplikasi (internal dan eksternal BKF) yang didukung oleh jaringan LAN yang terkontrol dan termonitor secara optimal, (iii) pengembangan sistem informasi (misal, *economic executive dashboard*) dan instrumen kebijakan yang aplikatif dan *user friendly*, dan (iv) peningkatan kapasitas pegawai di bidang informasi.

BAB III

MATRIKS KINERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Untuk mendukung pelaksanaan Renstra BKF Tahun 2010 – 2014 diperlukan arah kebijakan dan strategi kinerja yang dituangkan dalam Matriks Kinerja Badan Kebijakan Fiskal. Matriks kinerja menampung rencana aksi yang akan dilakukan BKF selama kurun waktu 5 tahun ke depan dengan berpedoman pada Kontrak Kinerja Menteri Keuangan dengan Presiden termasuk didalamnya Program 100 hari KIB II, Temu Nasional, dan Matriks Kinerja Pembangunan BKF Tahun 2010 - 2014.

Di dalam Kontrak Kinerja Menteri Keuangan dengan Presiden, BKF diamanatkan untuk melaksanakan program aksi terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal yang meliputi :

- (i) Memastikan tercapainya Prioritas Nasional di bidang lain, yang mencakup namun tidak terbatas pada: peningkatan investasi di bidang pangan, pertanian, dan industri pedesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta system subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.
- (ii) Melaksanakan perbaikan peraturan yang mendukung investasi yaitu mengkaji dan mengusulkan perbaikan peraturan-peraturan yang menghambat investasi sebelum Juni 2010 dan memastikan efektifitas perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- (iii) Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi yaitu mengkaji dan mengusulkan penyempurnaan kebijakan dan peraturan mengenai subsidi BBM, listrik, dan pupuk sebelum Juni 2010 dan memastikan efektifitas peraturan yang disempurnakan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Sedangkan sesuai Hasil Temu Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Oktober 2009, Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam tiga bidang meliputi:

- (i) Bidang Infrastruktur, program aksi yang akan dilaksanakan Kementerian Keuangan untuk menanggapi isu-isu yang berkembang antara lain:
 - a. Pembahasan perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU tanah dan *land capping* untuk ditampung dalam APBN-P 2010.
 - b. Isu skema *Public Private Partnership* (PPP), dengan rencana aksi:
 - Penyelesaian revisi Perpres 67/2005 yang menjamin dukungan investasi proyek infrastruktur yang layak secara ekonomi.
 - Penyusunan ketentuan tata kelola yang baik, adil, akuntabel dan transparan terhadap dukungan pemerintah pada proyek infrastruktur yang bersifat non kompetitif.

- c. Penyusunan SKB Menteri ESDM, Meneg BUMN, dan Menteri Keuangan mengenai prosedur negoisasi dan penetapan IPP kelistrikan, indikator harga, dan penjaminan PSO.
 - d. Penyusunan aturan penurunan tarif bea masuk sebagai pelaksanaan APBN 2010.
- (ii) Bidang Energi, program aksi yang dilaksanakan Kementerian Keuangan untuk menanggapi isu-isu yang berkembang antara lain:
- a. Menerbitkan Perpres tentang proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap II;
 - b. Merevisi Perpres No. 104 Tahun 2003 tentang TDL PLN; Menyusun Roadmap rasionalisasi subsidi listrik; Menyusun Roadmap rasionalisasi subsidi BBM;
 - c. Memberikan insentif khusus (fiskal) untuk pelaksanaan optimalisasi produksi migas; memberikan insentif untuk pembangunan refinery baru; memberikan insentif fiskal bagi pengembangan CBM; sinkronisasi aturan dalam RPP tentang *Cost Recovery* dengan kontrak PSC termasuk masalah perpajakan;
 - d. Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif pemanfaatan *renewable energy* berupa keringanan pajak; menerbitkan Perpres untuk penurunan pajak 5 persen dalam jangka waktu 15 tahun untuk PLTP (Panas Bumi).
- (iii) Bidang Industri dan Jasa, program aksi yang dilaksanakan Kementerian Keuangan untuk menanggapi isu-isu yang berkembang antara lain:
- a. Melakukan review PP No. 34/1996 ttg BMAD dan BM Imbalan.
 - b. Penetapan pajak ekspor untuk produk-produk mentah (bahan baku); pembebasan PPN atas bahan baku perak, crumb rubber, sheet dan crepe.

Matriks Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kebijakan Fiskal

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2010-2014, Badan Kebijakan Fiskal menetapkan satu program dan 6 kegiatan, yaitu:

Program : Perumusan Kebijakan Fiskal

Tujuan Program

Terwujudnya kebijakan fiskal yang *sustainable* dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian.

Indikator Kinerja Program

1. Persentase rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai kebijakan
2. Jumlah rekomendasi DELRI yang diadopsi menjadi kesepakatan internasional
3. Persentase hasil kajian kerja sama perguruan tinggi yang bisa diimplementasikan
4. Efektivitas kebijakan pendapatan negara
5. Tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal

- a. Deviasi proyeksi besaran asumsi makro
- b. Deviasi proyeksi target defisit APBN
- c. Deviasi proyeksi target penerimaan perpajakan
6. Persentase cadangan anggaran risiko fiskal
7. Tingkat kepuasan stakeholders terhadap kualitas paparan kinerja ekonomi
8. Jumlah publikasi kajian pada web
9. Jumlah jurnal ekonomi yang diterbitkan
10. Jumlah *user access* laporan/kajian yang dipublikasikan dalam web
11. Jumlah data yang dikelola dan dimutakhirkan secara berkala
12. Jumlah variabel data perkembangan ekonomi dalam *dashboard*
13. Persentase penggunaan *economic modeling/econometric methods*
14. Jumlah model ekonomi yang dikembangkan
15. Rata-rata waktu penyelesaian *quick response policy*
16. Persentase pejabat yang telah memenuhi kompetensi jabatannya
17. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
18. Persentase jam pelatihan pegawai Kemenkeu terhadap jam kerja
19. Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi
20. Persentase penyelesaian SOP
21. Jumlah aplikasi yang dikembangkan
22. Tingkat pemanfaatan IT
23. Persentase penyerapan DIPA

Kegiatan 1: Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan PNBP

Unit Pelaksana: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Tugas

Melaksanakan perumusan pokok-pokok kebijakan, analisis, dan evaluasi di bidang perpajakan, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya dari sisi tarif, subjek, dan objek atas bea masuk, bea keluar, cukai, pajak, dan PNBP. Tugas ini dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.

Tujuan Kegiatan

Tersedianya rekomendasi dan rumusan kebijakan pendapatan negara yang mendukung terwujudnya kebijakan fiskal.

Indikator Kinerja Utama

Kegiatan Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan PNBP memiliki indikator kinerja utama yaitu:

1. Persentase rekomendasi kebijakan yang diterima menjadi kebijakan

2. Efektivitas kebijakan pendapatan negara
3. Tingkat kepuasan *stakeholders*
4. Jumlah publikasi kajian pada Web
5. Jumlah sosialisasi kebijakan pendapatan negara
6. Jenis data yang dikelola dan dimutakhirkan secara berkala
7. Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama internasional
8. Persentase penggunaan *economic modelling/econometric methods*
9. Jumlah kajian yang dilakukan
10. Rata-rata waktu penyelesaian *quick response*
11. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
12. Persentase jam pelatihan pegawai PKPN terhadap jam kerja
13. Jumlah SOP yang disusun atau disempurnakan
14. Persentase penyerapan DIPA

Kegiatan 2: Perumusan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Unit Pelaksana: Pusat Kebijakan APBN

Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban atas pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN.

Tujuan Kegiatan

Tersusunnya Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan. Tersedianya bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta tersedianya rekomendasi kebijakan APBN yang *sustainable* untuk mendukung pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Utama

Kegiatan Perumusan Kebijakan APBN memiliki indikator utama yaitu:

1. Persentase kajian yang diterima pimpinan sebagai rekomendasi kebijakan
2. Deviasi proyeksi target defisit APBN
3. Deviasi proyeksi target penerimaan perpajakan
4. Deviasi proyeksi belanja K/L
5. Jumlah publikasi kajian pada *web*
6. Jumlah data yang dikelola dan dimutakhirkan secara berkala

7. Persentase penggunaan *economic modeling/econometric methods*
8. Jumlah model ekonomi yang dikembangkan
9. Rata-rata waktu penyelesaian *quick response policy*
10. Persentase jumlah quick response yang selesai tepat waktu
11. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
12. Persentase jam pelatihan pegawai PKAPBN terhadap jam kerja
13. Jumlah SOP yang disusun atau disempurnakan
14. Jumlah aplikasi yang dikembangkan
15. Persentase penyerapan DIPA

Kegiatan 3: Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan

Unit Pelaksana: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Tugas

Melaksanakan perumusan rekomendasi, analisis, evaluasi, dan pengelolaan risiko ekonomi global, BUMN, dan dukungan pemerintah. Tugas ini dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal.

Tujuan Kegiatan

Terwujudnya pengelolaan risiko fiskal yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan tersedianya rekomendasi dan pernyataan risiko fiskal

Indikator Kinerja Utama

Kegiatan Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan memiliki indikator kinerja utama yaitu:

1. Persentase cadangan anggaran risiko fiskal
2. Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang terukur
3. Persentase rekomendasi pengelolaan risiko fiskal yang diterima Menteri Keuangan
4. Monitoring efektifitas implementasi kebijakan pemberian dukungan pemerintah
5. Jumlah publikasi kajian pada *web*
6. Jumlah data yang dikelola dan dimutakhirkan secara berkala
7. Persentase penggunaan *economic modelling/econometric method*
8. Jumlah model ekonomi yang dikembangkan
9. Jumlah kajian yang dilakukan
10. Rata-rata waktu penyelesaian *quick response policy*
11. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
12. Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikasi kompetensi
13. Persentase jam pelatihan pegawai PPRF terhadap jam kerja
14. Jumlah SOP yang disusun atau disempurnakan
15. Jumlah aplikasi yang dikembangkan
16. Persentase penyerapan DIPA

Kegiatan 4: Perumusan Kebijakan Ekonomi**Unit Pelaksana: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro****Tugas**

Melaksanakan perumusan rekomendasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, pengembangan sistem informasi data dan statistik di bidang fiskal, serta pengembangan sistem informasi dan analisis ekonomi makro.

Tujuan Kegiatan

Terwujudnya kebijakan ekonomi makro yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian

Indikator Kinerja Utama

Kegiatan Perumusan Kebijakan Ekonomi memiliki indikator utama yaitu:

1. Persentase hasil kajian kerja sama Perguruan Tinggi yang bisa diimplementasikan
2. Deviasi proyeksi besaran asumsi makro
 - a. Deviasi proyeksi pertumbuhan ekonomi
 - b. Deviasi proyeksi SBI
 - c. Deviasi proyeksi inflasi
 - d. Deviasi proyeksi nilai tukar
3. Tingkat kepuasan stakeholders terhadap kualitas paparan kinerja ekonomi
4. Tingkat kepuasan stakeholders terhadap kerjasama penelitian
5. Jumlah publikasi kajian pada web
6. Jumlah jurnal ekonomi yang diterbitkan
7. Jumlah data yang dikelola dan dimutakhirkan secara berkala
8. Jumlah variabel data perkembangan ekonomi dalam dashboard
9. Persentase penggunaan economic modeling/econometric methods
10. Jumlah model ekonomi yang dikembangkan
11. Jumlah kajian yang dilakukan
12. Rata-rata waktu penyelesaian quick response policy
13. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
14. Persentase jam pelatihan pegawai PKEM terhadap jam kerja
15. Jumlah SOP yang disusun atau disempurnakan
16. Jumlah aplikasi yang dikembangkan
17. Persentase penyerapan DIPA

Kegiatan 5: Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Internasional

Unit Pelaksana: Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional

Tugas

Melaksanakan kegiatan perumusan, pemantauan, evaluasi koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.

Tujuan Kegiatan

Terwujudnya kebijakan ekonomi makro yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian.

Indikator Kinerja Utama

Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Internasional memiliki indikator kinerja utama yaitu:

1. Jumlah rekomendasi DELRI yang diadopsi menjadi kesepakatan internasional
2. Jumlah penerima hibah dalam rangka kerja sama teknik luar negeri
3. Jumlah Technical Asistant (TA) yang diterima dari Development Partner
4. Jumlah publikasi kajian pada web
5. Jumlah data yang dikelola dan dimutakhirkan secara berkala
6. Jumlah pemantauan internasional dan updating ROSC
7. Jumlah rapat koordinasi dengan instansi terkait
8. Jumlah pertemuan dengan stakeholder
9. Jumlah partisipasi dalam forum internasional yang dilaksanakan
10. Jumlah pertemuan internasional yang diselenggarakan
11. Jumlah program kunjungan misi asing
12. Jumlah model ekonomi yang dikembangkan
13. Jumlah laporan surveillance ekonomi internasional
14. Jumlah kajian yang dilakukan
15. Rata-rata waktu penyelesaian quick response policy
16. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
17. Persentase jam pelatihan pegawai PKKSI terhadap jam kerja
18. Jumlah SOP yang disusun atau disempurnakan
19. Jumlah aplikasi yang dikembangkan
20. Persentase penyerapan DIPA

Kegiatan 6: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Unit Pelaksana: Sekretariat Badan

Tugas

Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan negara, penyelenggaraan operasional perkantoran, perawatan gedung kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor, serta penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

Tujuan Kegiatan

Terwujudnya organisasi BKF yang efektif dengan pelaksanaan koordinasi kegiatan dan dukungan pelayanan prima.

Indikator Kinerja Utama

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya memiliki indikator kinerja utama yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pegawai

2. Jumlah user access laporan/kajian yang dipublikasikan dalam web
3. Persentase penyelesaian DIR (Daftar Inventaris Ruangan)
4. Akurasi inventarisasi BMN (rekonsiliasi BMN)
5. Tingkat pemanfaatan IT
6. Durasi *downtime server*
7. Persentase jam pelatihan pegawai BKF terhadap jam kerja
8. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
9. Persentase pegawai yang berpendidikan S2 dan S3
10. Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
11. Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi
12. Persentase penyerapan DIPA (BKF)
13. Persentase akurasi SPM yang diajukan ke KPPN
14. Persentase rekomendasi audit yang selesai ditindaklanjuti
15. Persentase penyelesaian revisi anggaran oleh KPA yang tepat waktu (2 hari)
16. Jumlah pegawai Setban yang dijatuhi hukuman disiplin
17. Persentase jam pelatihan pegawai Setban terhadap jam kerja
18. Jumlah SOP yang disusun atau disempurnakan
19. Jumlah aplikasi yang dikembangkan
20. Persentase penyerapan anggaran Sekretariat